

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting untuk menjalankan hubungan antar negara dalam hubungan internasional. Keberadaan diplomasi tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem internasional yang bersifat anarkis, yakni ketiadaan otoritas tertinggi yang mampu mengatur perilaku negara secara mengikat. Dalam kondisi tersebut, diplomasi berfungsi sebagai mekanisme utama bagi negara-negara untuk mengelola kepentingan nasional, mencegah eskalasi konflik, serta membangun kerja sama tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung (Berridge, 2015). Dalam sistem yang tidak memiliki pemerintah dunia, diplomasi menjadi sarana rasional untuk menghindari ketidakpastian dan meminimalkan biaya konflik terbuka, sekaligus menjaga stabilitas relatif dalam interaksi antarnegara.

Secara historis, diplomasi menjadi sarana utama komunikasi antarnegara sejak sistem negara-bangsa modern terbentuk pasca Perdamaian Westphalia. Namun, diplomasi tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi formal, melainkan juga sebagai instrumen kekuasaan yang memungkinkan negara memengaruhi preferensi, persepsi, dan tindakan aktor lain dalam sistem internasional (Sharp, 2009). Melalui diplomasi, negara dapat menyampaikan kepentingannya, membentuk koalisi, serta menciptakan legitimasi atas kebijakan luar negeri yang dijelankannya. Dengan demikian, diplomasi bukan sekadar praktik administratif hubungan luar negeri, tetapi bagian integral dari proses distribusi dan reproduksi kekuasaan dalam sistem internasional.

Dalam hal ini, diplomasi memiliki dimensi strategis yang melampaui sekadar negosiasi formal. Diplomasi mencerminkan kemampuan negara untuk membaca struktur kekuasaan internasional dan memanfaatkannya guna mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, diplomasi menjadi sarana utama bagi negara baik besar maupun kecil untuk bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan internasional yang kompetitif dan tidak seimbang. Negara-negara

dengan kapasitas terbatas sekalipun tetap memiliki ruang untuk bermanuver melalui strategi diplomatik yang cermat dan kontekstual.

Kemudian, memasuki abad ke-21 muncul pandangan bahwa globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya peran aktor non-negara akan mengurangi relevansi diplomasi tradisional. Tetapi, realitas politik internasional justru menunjukkan sebaliknya dan diplomasi tidak mengalami kemunduran, melainkan transformasi dalam bentuk, metode, serta arena operasionalnya (Hocking et al., 2012). Transformasi tersebut terlihat dari meningkatnya praktik diplomasi publik, diplomasi digital, serta keterlibatan dalam forum multilateral yang semakin kompleks.

Konflik internasional kontemporer semakin jarang diwujudkan melalui perang terbuka antarnegara dan lebih sering dimanifestasikan dalam bentuk tekanan tidak langsung seperti sanksi ekonomi, isolasi politik, perang narasi, serta kompetisi normatif. Dalam kondisi tersebut, diplomasi menjadi instrumen kunci untuk mengelola konflik, membangun legitimasi internasional, serta membentuk opini global (Cooper, Heine, & Thakur, 2013). Negara-negara menggunakan diplomasi untuk menggalang dukungan, memengaruhi organisasi internasional, dan mendinginkan konflik sesuai dengan kepentingan mereka.

Selain itu, diplomasi abad ke-21 tidak hanya bersifat bilateral tetapi multilateral dan transnasional. Pada forum-forum internasional, organisasi regional, serta mekanisme kerja sama Selatan-Selatan menjadi arena penting bagi negara-negara untuk memperjuangkan kepentingannya. Maka dari itu, diplomasi tetap menjadi instrumen utama dalam politik internasional modern, bahkan ketika bentuk-bentuk kekuasaan mengalami diversifikasi

Relevansi diplomasi dalam politik global tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan internasional yang bersifat asimetris. Sistem internasional kontemporer ditandai oleh keberadaan negara hegemon yang memiliki kemampuan dominan dalam membentuk norma, aturan, dan institusi global. Dalam perspektif teori hegemoni, dominasi tidak hanya dijalankan melalui kekuatan material seperti militer dan ekonomi, tetapi juga melalui kontrol ideologis dan institusional yang menciptakan legitimasi atas tatanan internasional yang ada (Gramsci, 1971; Cox,

1983). Hegemoni bekerja melalui kombinasi persetujuan dan paksaan, sehingga tatanan internasional tampak wajar dan sah bagi sebagian besar aktor.

Amerika Serikat merupakan contoh utama kekuatan hegemonik yang mampu memanfaatkan diplomasi sebagai instrumen penyebaran nilai-nilai liberal, demokrasi elektoral, dan ekonomi pasar bebas sebagai norma universal. Melalui jaringan institusi internasional, aliansi politik, dan mekanisme diplomatik, Amerika Serikat dapat memengaruhi arah kebijakan negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan koersif secara langsung (Nye, 2004). Diplomasi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana hegemonik yang membentuk persepsi tentang legitimasi dan kepastian dalam politik internasional.

Namun, struktur hegemonik tersebut juga membuka ruang bagi munculnya resistensi. Negara-negara yang merasa dirugikan oleh tatanan internasional yang didominasi oleh satu kekuatan besar sering kali menggunakan diplomasi sebagai alat untuk menantang, menegosiasikan ulang, atau mengurangi dominasi hegemonik tersebut. Dengan demikian, diplomasi menjadi arena kontestasi antara dominasi dan perlawanan dalam sistem internasional. Selain itu, Amerika Latin yang merupakan salah satu kawasan paling jelas dapat mencerminkan dinamika hegemoni dan resistensi dalam politik internasional. Sejak awal abad ke-20, Amerika Serikat menegaskan perannya sebagai kekuatan dominan di kawasan ini melalui Monroe Doctrine dan berbagai kebijakan intervensif. Dominasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui intervensi militer langsung, tetapi juga melalui diplomasi, tekanan ekonomi, dan pembentukan rezim politik yang sejalan dengan kepentingan Washington (Smith, 2010; Grandin, 2006).

Pada konteks Amerika Latin dimana diplomasi Amerika Serikat sering kali berfungsi sebagai instrumen kontrol struktural. Dukungan terhadap pemerintahan pro-Amerika, penggunaan organisasi regional seperti Organisasi negara-negara Amerika (OAS), serta penerapan sanksi terhadap rezim yang dianggap menyimpang dari norma liberal demokratis menjadi pola berulang dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini (Mainwaring, 2024).

Namun, dominasi tersebut dapat memicu munculnya berbagai bentuk perlawanan diplomatik dengan sejumlah negara Amerika Latin yang mengembangkan strategi

kebijakan luar negeri yang bertujuan memperluas otonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Diplomasi regional, integrasi alternatif, dan solidaritas ideologis menjadi instrumen utama dalam upaya menantang dominasi hegemonik di kawasan.

Kemudian, Venezuela menempati posisi strategis dalam dinamika hegemoni kawasan karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia serta peran penting dalam geopolitik energi global. Sebelum era pemerintahan Hugo Chavez, hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela relatif pragmatis dan didasarkan pada kepentingan ekonomi bersama, terutama pada sektor energi (Corrales & Penfold, 2015).

Perubahan signifikan terjadi ketika Hugo Chavez dan Nicolas Maduro mengimplementasikan kebijakan nasionalisasi sumber daya alam serta memperkuat kontrol negara atas sektor strategis. Kebijakan ini disertai dengan retorika anti-imperialisme yang secara terbuka menantang dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin (Trinkunas, 2011). Yang mengakibatkan hubungan bilateral mengalami pergeseran dari kerja sama pragmatis menjadi konfrontasi politik dan diplomatik.

Pada tahun 2015, Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap pejabat dan institusi Venezuela dengan dalih kemunduran demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Hudson, 2020). Ketegangan mencapai puncaknya pada 2019 ketika Amerika Serikat mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela, yang kemudian direspons oleh Nicolas Maduro dengan memutuskan hubungan diplomatik (Smilde, 2020). Hingga periode 2023-2025, sanksi tetap menjadi instrumen utama tekanan Amerika Serikat meskipun terdapat upaya dialog terbatas (Reuters, 2023; BBC News, 2025).

Sejak diberlakukannya Executive Order 13692 oleh Presiden Barack Obama pada Maret 2015 yang menetapkan Venezuela sebagai ancaman luar biasa dan tidak biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hubungan bilateral kedua negara memasuki fase konfrontatif yang lebih sistematis (White House, 2015). Kebijakan tersebut tidak hanya merepresentasikan perubahan retorika diplomatik, tetapi juga menandai transformasi pendekatan Amerika Serikat dari tekanan politik normatif menjadi instrumen ekonomi yang terinstitusionalisasi

dalam kerangka hukum domestik AS. Executive Order ini menjadi fondasi legal bagi serangkaian kebijakan lanjutan yang semakin memperluas cakupan sanksi, baik terhadap individu pejabat Venezuela maupun terhadap struktur ekonomi negara tersebut. Kebijakan tersebut kemudian diperluas melalui serangkaian sanksi ekonomi, termasuk pembatasan akses Venezuela terhadap sistem keuangan internasional pada 2017 serta embargo terhadap perusahaan minyak negara PDVSA pada Januari 2019 (U.S. Department of the Treasury, 2019). Pembatasan akses terhadap sistem keuangan internasional pada 2017 secara efektif memutus kemampuan pemerintah Venezuela untuk melakukan refinancing utang dan memperoleh pembiayaan baru melalui pasar obligasi global, sementara embargo terhadap PDVSA pada 2019 secara langsung menysar jantung ekonomi negara tersebut, yakni sektor energi. Dengan demikian, sejak 2015 hingga 2019 terjadi eskalasi bertahap dari targeted sanctions menuju sectoral sanctions yang berdampak struktural, menandai pergeseran dari tekanan diplomatik terbatas menjadi strategi tekanan ekonomi komprehensif yang bersifat sistemik.

Data empiris menunjukkan bahwa sanksi ini berdampak signifikan terhadap pendapatan minyak Venezuela, yang sebelumnya menyumbang lebih dari 90% devisa negara (Corrales & Penfold, 2015). Struktur ekonomi Venezuela yang sangat bergantung pada ekspor minyak menjadikan negara ini sangat rentan terhadap gangguan eksternal dalam sektor energi. Produksi minyak Venezuela yang pada 2015 masih berada di atas 2,3 juta barel per hari turun drastis hingga di bawah 800 ribu barel per hari pada 2020 (OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021). Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi biasa dalam siklus komoditas global, melainkan kolaps produksi yang jarang terjadi dalam sejarah negara-negara anggota OPEC. Kombinasi antara keterbatasan akses terhadap teknologi, kesulitan memperoleh diluen untuk heavy crude Orinoco Belt, hambatan pembiayaan, serta sanksi sekunder terhadap mitra dagang mempercepat kontraksi kapasitas produksi PDVSA. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana instrumen ekonomi digunakan sebagai bentuk tekanan hegemonik non-militer, di mana dominasi terhadap sistem keuangan internasional dan mekanisme perdagangan global dimanfaatkan untuk menghasilkan dampak politik tanpa intervensi militer langsung. Dalam konteks

teori hubungan internasional, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk economic statecraft yang memanfaatkan interdependensi asimetris dalam sistem global.

Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, pemerintahan Nicolas Maduro mengembangkan strategi diplomasi resistensi yang tercermin dalam beberapa langkah konkret. Strategi ini tidak bersifat reaktif semata, melainkan menunjukkan pola konsolidasi aliansi alternatif dan reposisi geopolitik yang lebih luas

Fenomena ini sejalan dengan argumentasi Ritchie dan Egeland (2018) dalam *The Diplomacy of Resistance: Power, Hegemony and Nuclear Disarmament*, bahwa aktor yang berada dalam posisi lemah secara struktural dapat mengembangkan strategi diplomatik kolektif dan normatif untuk menantang hegemoni tanpa konfrontasi militer langsung. Dalam konteks Venezuela, diplomasi resistensi diwujudkan melalui pembingkaihan normatif (anti-intervensi dan kedaulatan), pembentukan koalisi alternatif, serta pemanfaatan institusi multilateral untuk mendeligitimasi tekanan hegemonik Amerika Serikat. Dengan demikian, praktik diplomasi Venezuela di era Maduro (2015-2025) mencerminkan pola resistensi non-militer yang bersifat strategis, normatif, dan institusional dalam menghadapi struktur kekuasaan internasional yang asimetris.

Dengan demikian, interaksi antara hegemoni Amerika Serikat dan diplomasi resistensi Venezuela dapat mencerminkan dinamika kekuasaan yang asimetris namun tetap terbuka terhadap negosiasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa diplomasi dapat berfungsi sebagai instrumen perlawanan non-militer bagi negara berkembang dalam menghadapi tatanan internasional yang hegemonik (Paul, 2018). Maka dari itu, kajian mengenai diplomasi resistensi Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro menjadi penting untuk memahami transformasi diplomasi, hegemoni, dan resistensi dalam sistem internasional kontemporer.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas sanksi Amerika Serikat terhadap Venezuela, krisis ekonomi domestik, maupun dinamika politik internal rezim Maduro, kajian yang secara spesifik menganalisis kebijakan luar negeri Venezuela dalam kerangka konseptual *diplomacy of resistance* masih relatif terbatas dan cenderung terfragmentasi. Sebagian studi lebih menitikberatkan pada efektivitas sanksi atau dinamika oposisi domestik, sementara dimensi strategis diplomasi

Venezuela dalam memanfaatkan forum multilateral, membangun koalisi alternatif, serta membingkai narasi anti-hegemonik belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka analitis yang utuh. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan teori hegemoni Gramscian dengan praktik diplomasi resistensi dalam konteks Amerika Latin kontemporer, khususnya periode 2015-2025 yang ditandai oleh eskalasi sanksi dan perubahan konfigurasi geopolitik global. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana diplomasi resistensi Venezuela dijalankan sebagai strategi non-militer untuk mempertahankan otonomi politik di tengah tekanan hegemonik Amerika Serikat, sekaligus memperkaya literatur mengenai transformasi diplomasi dalam sistem internasional yang asimetris.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat pada era pemerintahan Nicolas Maduro (2015-2025) ditandai oleh meningkatnya ketegangan politik, ekonomi, serta ideologis yang berakar pada perbedaan orientasi kebijakan dan kepentingan strategis di kawasan Amerika Latin. Amerika Serikat memandang dinamika politik domestik Venezuela sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan nilai demokrasi, sementara pemerintah Venezuela menilai kebijakan Amerika Serikat sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara (Qorina et al., 2020).

Sejak tahun 2015, Amerika Serikat secara bertahap memberlakukan sanksi ekonomi dan finansial yang menargetkan sektor strategis Venezuela, terutama industri minyak sebagai sumber utama pendapatan negara. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap penurunan kapasitas produksi, terbatasnya akses terhadap pasar internasional, serta melemahnya stabilitas makroekonomi nasional. Dampak lanjutan terlihat pada meningkatnya inflasi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat (Budisatria et al., 2022)

Kemudian, dalam perspektif ekonomi politik internasional sanksi dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan bagi negara dominan untuk memengaruhi perilaku politik negara target. Namun, konsekuensinya sering kali meluas hingga memperparah krisis kemanusiaan dan memperdalam kerentanan domestik,

terutama ketika negara yang disanksi memiliki ketergantungan tinggi pada satu sektor ekonomi (Weisbrot & Sachs, 2019).

Menghadapi tekanan eksternal tersebut, Venezuela mengadopsi pendekatan resistensi sebagai strategi diplomasi untuk mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri dan menjaga keberlangsungan rezim. Strategi ini diwujudkan melalui diversifikasi mitra internasional, penguatan kerja sama dengan kekuatan non-Barat, serta pemanfaatan organisasi regional sebagai sarana membangun solidaritas politik. Pembentukan dan partisipasi aktif dalam aliansi seperti ALBA mencerminkan upaya kolektif negara-negara Amerika Latin dalam menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan (Serbin, 2022).

Di sisi lain, peran diplomasi resistensi tidak terlepas dari berbagai keterbatasan internal. Krisis ekonomi berkepanjangan, instabilitas politik domestik, serta menurunnya kapasitas negara menjadi tantangan struktural dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang konsisten. Pada saat yang sama, tekanan internasional terus berkembang seiring meningkatnya isolasi diplomatik dan kompetisi geopolitik global, sehingga menempatkan Venezuela pada posisi yang kompleks dalam sistem internasional (Flint, 2005).

Berdasarkan konteks tersebut, permasalahan utama penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk serta implementasi diplomasi resistensi Venezuela dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat selama periode 2015-2025. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi peran strategi tersebut, termasuk keterbatasan ekonomi domestik dan dinamika distribusi kekuatan global. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana diplomasi resistensi berperan sebagai instrumen strategis dalam mempertahankan kedaulatan politik serta menopang stabilitas pemerintahan Nicolas Maduro di tengah tekanan internasional.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan Pokok

Bagaimana peran diplomasi resistensi Venezuela dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat pada era pemerintahan Nicolas Maduro 2015-2025?

2. Pertanyaan Operasional

Bagaimana dampak diplomasi resistensi yang dilakukan Venezuela terhadap dominasi Amerika Serikat di era pemerintahan Nicolas Maduro 2015-2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat pada era pemerintahan Nicolas Maduro dengan menempatkan praktik diplomasi resistensi sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan karakter dominasi Amerika Serikat terhadap Venezuela sepanjang periode 2015-2025, terutama melalui penerapan sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, serta upaya delegitimasi terhadap pemerintahan Nicolas Maduro dalam tingkat internasional. Dominasi tersebut dipahami tidak hanya sebagai ekspresi kekuatan material, tetapi sebagai praktik hegemonik yang bekerja melalui instrumen politik, ekonomi, dan normatif.

Dalam penelitian ini juga mengidentifikasi dan menjelaskan strategi-strategi diplomasi resistensi yang dapat dikembangkan oleh Venezuela dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Strategi ini dapat dianalisis baik dalam konteks hubungan bilateral Venezuela dan Amerika Serikat maupun melalui keterlibatan aktif Venezuela dalam organisasi dan kerja sama kawasan, terutama Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), sebagai upaya membangun solidaritas ideologis dan kekuatan kolektif di kawasan Amerika Latin.

Penelitian ini juga menganalisis dinamika diplomasi resistensi Venezuela dalam merespons perubahan serta eskalasi tekanan eksternal dari Amerika Serikat selama periode penelitian. Fokus pada analisis ini diarahkan bagaimana kebijakan luar negeri Venezuela beradaptasi terhadap perkembangan situasi internasional, mulai dari penerapan sanksi awal, pengakuan oposisi oleh Amerika Serikat, hingga intensifikasi tekanan ekonomi dan diplomatik pada masa jabatan ketiga Nicolas Maduro. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa diplomasi resistensi bersifat dinamis dan kontekstual, bukan strategi yang statis.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai peran diplomasi resistensi Venezuela sebagai strategi negara berkembang dalam menghadapi hegemoni

negara adidaya dalam sistem politik internasional yang asimetris. Evaluasi peran tersebut dapat mencakup sejauh mana diplomasi resistensi mampu untuk mempertahankan kedaulatan politik, legitimasi pemerintahan, dan kemandirian ekonomi nasional Venezuela di tengah krisis domestik dan tekanan internasional yang berkelanjutan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang berjudul *Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025* diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian ilmu hubungan internasional terutama dalam teori hegemoni dan kekuasaan serta teori diplomasi resistensi. melalui analisis hubungan Venezuela dan Amerika Serikat dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana praktik kekuasaan global dan dominasi politik ekonomi dapat ditantang melalui strategi diplomasi yang bersifat menolak.

Dalam konteks teori hegemoni dan kekuasaan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hegemoni Amerika Serikat tidak hanya dijalankan melalui aspek militer, tetapi melalui instrumen ekonomi, politik, dan ideologi. Dengan memperdalam kasus Venezuela di era Nicolas Maduro, penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana sebuah negara berkembang merespons struktur kekuasaan global yang timpang dan membangun alternatif sistem politik dan ekonomi yang lebih independen dari pengaruh hegemonik Barat. Hal ini sekaligus memperkaya pemahaman terhadap bagaimana kekuasaan hegemonik beroperasi dan dipertahankan serta bagaimana bentuk resistensi negara periferi muncul sebagai responnya.

Sementara itu, teori diplomasi resistensi memperluas tentang bentuk diplomasi non-tradisional yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Teori ini dapat menjelaskan bahwa diplomasi resistensi bukan sekadar reaksi terhadap tekanan eksternal, tetapi merupakan strategi politik yang terencana untuk menegosiasikan posisi suatu

negara dalam tatanan internasional. Melalui penelitian ini diharapkan akan muncul pemahaman baru bahwa diplomasi resistensi dapat menjadi instrumen efektif bagi negara yang ingin memperjuangkan kemandirian politik dan menolak dominasi kekuatan hegemonik global.

Secara teoritis penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai hubungan kekuasaan dalam sistem internasional, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang bagaimana diplomasi resistensi berfungsi sebagai bentuk perjuangan diplomatik di tengah ketimpangan global.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian yang berjudul Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan luar negeri, diplomat, serta praktisi hubungan internasional, khususnya di negara-negara berkembang yang menghadapi tekanan dari kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat. Kajian ini dapat dirancang dan diimplementasikan guna mempertahankan kedaulatan politik serta memperkuat posisi negara di forum internasional.

Bagi pemerintah atau lembaga diplomatik hasil dari penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana Venezuela memanfaatkan diplomasi resistensi sebagai alat politik luar negeri dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang berasal dari Amerika Serikat. Pengalaman venezuela dapat dijadikan pelajaran bagi negara-negara lain yang berusaha menjaga kemandirian nasional melalui jalur diplomatik dan solidaritas regional, misalnya melalui kerjasama antarnegara di kawasan Amerika Latin seperti ALBA (Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas). Bagi organisasi kawasan seperti Community of Latin and Caribbean States (CELAC) atau Union of South American Nations (UNASUR), memberikan pandangan bahwa solidaritas regional dan diplomasi kolektif dapat menjadi strategi efektif dalam menggapai tekanan eksternal serta menciptakan keseimbangan kekuasaan baru di kawasan.

Dari sisi sosial dan masyarakat luas penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dengan pentingnya kemandirian politik dan ekonomi, serta menunjukkan bahwa

diplomasi bukan sekadar alat negosiasi, melainkan sarana perjuangan bangsa untuk mempertahankan harga diri dan kedaulatan di tengah dominasi global. Diplomasi resistensi Venezuela dapat mencerminkan semangat perlawanan tidak hanya bersifat politik, tetapi ideologis yang merupakan bentuk perjuangan untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan setara bagi negara-negara berkembang.

Secara praktis, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, namun memiliki relevansi sosial yang luas untuk memperkuat kesadaran geopolitik dan kemandirian negara di era globalisasi dan ketimpangan kekuasaan internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian dan sistematika skripsi yang berjudul Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025 penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan konteks hubungan Venezuela dan Amerika Serikat yang dipenuhi dengan ketegangan akibat dominasi hegemoni Amerika Serikat. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan skripsi. Fokus dalam bab ini yaitu untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana diplomasi resistensi Venezuela menjadi fenomena penting untuk dikaji.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran. Dalam bab ini membahas dua teori utama: Teori Hegemoni dan Kekuasaan yang menjelaskan dominasi Amerika Serikat terhadap Venezuela, dan Teori Diplomasi Resistensi yang menjelaskan strategi Venezuela dalam menentang dominasi tersebut. Selain itu bab ini berisi konsep-konsep seperti kedaulatan, resistensi, dan dominasi global.

BAB III – METODE PENELITIAN DAN PENULISAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan data dapat diperoleh melalui studi literatur serta analisis dokumen resmi, kemudian diolah secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi diplomasi resistensi Venezuela pada periode 2015-2025.

BAB IV – HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis yang menguraikan Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025, yang berfokus pada bentuk-bentuk hegemoni Amerika Serikat terhadap Venezuela serta strategi diplomasi resistensi Venezuela yang mempengaruhi dominasi Amerika Serikat dan posisi geopolitik negara tersebut di kawasan Amerika Latin.

BAB V – PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian mengenai Diplomasi Resistensi Venezuela Terhadap Dominasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Nicolas Maduro Tahun 2015-2025, dengan menyoroti saran bagi pemerintah, diplomat, dan akademisi mengenai pentingnya penguatan diplomasi alternatif serta kajian lanjutan tentang resistensi negara-negara berkembang terhadap hegemon